

PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL SEKTOR PERTANIAN

¹Habibullah, ²Ahmad Taqiyuddin Almuhim

Prodi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara, Yogyakarta, Indonesia

¹habibhafidz@gmail.com, ²almuhimtaqiyuddin@gmail.com

Abstrak: Pengembangan Ekonomi Lokal dalam Sektor Pertanian. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Di Kecamatan Pagelaran sendiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan meningkatkan perekonomian konsep pengembangan ekonomi lokal juga dilaksanakan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan upaya apa saja yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal, apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal dan bagaimana dampak dari pengembangan ekonomi lokal ini. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran memberikan dampak yang positif dimana dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tercipta lapangan kerja baru sehingga meningkatkan perekonomian

Kata Kunci: ekonomi lokal, sektor pertanian, pembangunan

Abstract: Local Economic Development in the Agricultural Sector. Local Economic Development (PEL) is a process in which local governments and community organizations are involved to encourage, stimulate, maintain, business activities to create jobs. In Pagelaran sub-district itself, to create new jobs and improve the economy, the concept of local economic development is also implemented. The purpose of this study is to describe what efforts the government makes in developing the local economy, what are the supporting and inhibiting factors in developing the local economy and how the impact of this local economic development. This research uses a descriptive type with a qualitative approach. The collection techniques used include observation, interview, and documentation methods. The results of the study show that local economic development in Pagelaran District has a positive impact where with the development of the local economy new jobs are created so as to improve the economy

Keywords: local economy, agricultural sector, development

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah dan masyarakat membentuk pola kemitraan dengan melibatkan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut (Mudrajat, 2004). Keduanya harus ditempatkan pada kedudukan yang sebenarnya yakni sebagai unsur yang sangat penting, dinamis, dan bahkan sangat menentukan dalam strategi-strategi pembangunan secara keseluruhan, terutama pada negara yang sedang berkembang dengan berpendapatan rendah (Badjuri, 2011). Untuk meningkatkan pembangunan daerah, terutama pada daerah pedesaan yang sebagian besar merupakan daerah pertanian, maka pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut melalui Pengembangan Ekonomi Lokal (Global Green Growth Institute, 2015). Misalnya dengan optimalisasi desa wisata, penekanan pada ekonomi hijau di sektor pertanian, dan sebagainya (Rahmayani et al., 2022; Yulia, 2019). Ekonomi hijau penting digalakkan oleh pemerintah daerah terutama untuk menghadapi ancaman pasar bebas di sektor ketahanan pangan, minimal di daerah masing-masing syukur-syukur bisa sampai di level nasional (Syihab et al., 2022).

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses dimana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu daerah yang telah menerapkan konsep pengembangan ekonomi lokal untuk mengembangkan wilayahnya. Pengembangan ini difokuskan pada sektor pertanian dimana sektor pertanian merupakan sektor basis yang dapat dikembangkan di Kecamatan Pagelaran (Nurjihadi & Dharmawan, 2016). Namun dalam pengembangannya konsep pengembangan ekonomi lokal ini menghadapi hambatan dan tantangan dalam pengembangannya dimana para petani masih bersifat tradisional sehingga di ini peran dari pemerintah sangat dibutuhkan (Alim, 2021). Pelaksanaan otonomi daerah masih setengah hati, konsepnya masih rancu terutama di sistem perizinan pembangunan daerah (Zainul, 2019).

Sehingga disini menjadi penting untuk diketahui problem pembangunan daerah dalam rangka pengembangan ekonomi lokal di sektor pertanian. Harapannya dapat diambil beberapa rumusan masalah, yaitu: yang pertama, bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran, kedua, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran, dan yang ketiga, bagaimana dampak pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran. Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan (Hauzan et al., 2021).

METODE

Metodologi yang digunakan dalam penulisan artikel ini dengan kualitatif deskriptif. Informasi mengenai pengembangan ekonomi lokal dalam sektor pertanian diambil dari beberapa artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal internet dan panduan penting dari ajaran-ajaran Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-sunah (hadits). Informasi dibaca dan dipelajari secara serius dan mendalam sehingga menghasilkan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap upaya pembangunan ekonomi daerah mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Pembangunan ekonomi daerah dapat dimulai pada pembangunan daerah pedesaan pada umumnya dan sektor pertanian pada khususnya karena keduanya sama sekali tidak bersifat pasif dan sekedar penunjang dalam proses pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Berikut ini uraian mengenai beberapa point yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal sektor pertanian, yaitu: otonomi daerah, administrasi pembangunan, pembangunan daerah, dan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu paparan peran pemerintah dalam upaya pembangunan ekonomi lokal di sektor pertanian dan faktor-faktor pendukung dan penghambat pembangunan ekonomi lokal dijelaskan di bagian akhir artikel ini.

A. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Zainul (2019) menjelaskan otonomi daerah dalam konteks perijinan agar tidak terjadi korupsi sehingga perlu dilibatkannya KPK.

B. Administrasi Pembangunan

Administrasi pembangunan menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) merupakan proses pengendalian usaha (administrasi) oleh negara/pemerintah untuk merealisasikan pertumbuhan yang direncanakan ke arah suatu keadaan yang dianggap lebih baik dan kemajuan di dalam berbagai aspek kehidupan bangsa. Menurut pendapat Bintoro Tjokroamidjojo (1985) mengemukakan bahwa administrasi pembangunan mempunyai tiga fungsi: 1) penyusunan kebijaksanaan penyempurnaan administrasi negara yang meliputi: upaya penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, pegawai dan pengurusan sarana-sarana administrasi lainnya (Fareza, 2016). Ini disebut the development of administration (pembangunan administrasi) yang kemudian lebih dikenal dengan istilah "Administrative Reform" (Reformasi Administrasi). 2) perumusan kebijaksanaankebijaksanaan dan program-programa pembangunan di berbagai bidang serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut the administration of development (Administrasi untuk pembangunan). Administrasi untuk pembangunan (the development of administration)dapat dibagi atas dua, yaitu: (a) Perumusan kebijaksanaan pembangunan, (b) Pelaksanaan kebijaksanaan pembangunan secara

efektif. 3) penapaian tujuan-tujuan pembangunan tidak mungkin terlaksana dari hasil kegiatan pemerintahan saja. Faktor yang lebih penting adalah membangun partisipasi masyarakat.

C. Pembangunan Daerah

Menurut Tjokrowidjoyo (1995) pembangunan daerah dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: 1) segi pembangunan sektoral, pencapaian sasaran pembangunan dilakukan melalui berbagai pembangunan sektoral yang dilaksanakan di daerah. Pembangunan sektoral disesuaikan dengan yang dimiliki oleh masing-masing daerah; 2) segi pembangunan Wilayah, yang meliputi perkotaan dan pedesaan sebagai pusat dan lokasi kegiatan sosial ekonomi wilayah; dan 3) segi pemerintahannya, agar tujuan pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pembangunan daerah perlu berfungsi dengan baik karena itu pembangunan merupakan usaha-usaha untuk mengembangkan dan mempererat pemerintah dalam rangka makin mantapnya otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggung jawab. Sedangkan menurut Arsyad (1999) menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah. Menurut Glasson (1990) konsep dasar basis ekonomi membagi perekonomian menjadi dua sektor yaitu: 1) Sektor sektor adalah sektor-sektor yang mengekspor barang-barang dan jasa ke tempat di luar batas perekonomian masyarakat yang bersangkutan atas masukan barang dan jasa mereka kepada masyarakat yang datang dari luar perbatasan perekonomian masyarakat yang bersangkutan (Hauzan et al., 2021; Hobrouw et al., 2021).

Sektor-sektor bukan basis adalah sektor-sektor yang menjadikan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang yang bertempat tinggal di dalam batas perekonomian masyarakat bersangkutan.

D. Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Selain itu, menurut Munir (2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaankelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal (Rahmayani et al., 2022). Jadi, pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Menurut Blakely dalam Supriyadi (2007) dalam keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil dalam kesempatan kerja dan usaha; 2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan; 3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran; dan 4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal. Dalam kaitannya dengan teori pertumbuhan ekonomi, maka Krugman (1994) mengatakan bahwa investasi sumber daya manusia menjadi

lebih penting peranannya dalam pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas bagi negara sedang berkembang merupakan faktor penting dalam upaya untuk mengejar ketertinggalan pembangunan dengan negara lain. Era informasi dan teknologi yang berkembang dewasa ini semakin membuktikan bahwa penguasaan, teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Agar teknologi dapat dikuasai, maka dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam konteks proses produksi, maka adanya penguasaan teknologi yang baik, maka akan mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk produk baru dan cara produksi yang lebih efisien (Barro dalam Romer, 1994, h.36).

Upaya Pemerintah Mengembangkan Ekonomi Lokal di Kecamatan Pagelaran

Pengembangan ekonomi lokal merupakan proses di mana pemerintah lokal dan organisasi masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, memelihara, aktivitas usaha untuk menciptakan lapangan pekerjaan (Blakely and Bradshaw, 1994). Di Kecamatan Pagelaran sendiri pengembangan ekonomi lokal telah dilakukan dengan melihat potensi-potensi yang ada untuk selanjutnya dikembangkan menjadi produk unggulan. Untuk melihat potensi-potensi apa yang menjadi unggulan dapat dilihat berdasarkan PDRB Kecamatan Pagelaran dan Kabupaten Malang sehingga dapat diketahui produk-produk apa yang menjadi sektor basis dan yang bukan sektor basis. Untuk melihat apakah suatu sektor tersebut merupakan sektor basis ataupun non basis dapat digunakan melalui analisis LQ (Location Quotient). Upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal ada dua, yaitu melalui kebijakan ekonomi dan mobilisasi peran masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut.

a) Kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran

Dalam pengembangan ekonomi lokal ini tidak lepas dari peran pemerintah seperti yang diungkapkan oleh (Munir, 2007) Pengembangan ekonomi lokal (PEL) adalah suatu proses yang mencoba merumuskan kelembagaan-kelembagaan pembangunan di daerah, peningkatan kemampuan SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala lokal. Jadi pengembangan wilayah dilihat sebagai upaya pemerintah daerah bersama masyarakat dalam membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan kelembagaan secara lokal. Di Kecamatan Pagelaran sendiri awal mula pengembangan ekonomi lokal memang berawal dari pemerintah. Pada saat itu pemerintah melihat bahwa banyak potensi-potensi yang ada di Kecamatan Pagelaran yang seharusnya dapat dikembangkan menjadi produk –produk lain agar memiliki nilai jual yang tinggi. Melihat potensi-potensi pertanian yang ada pada saat itu maka pemerintah melakukan pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran tersebut dengan melihat potensi pertanian pada desa-desa yang bersangkutan. Karena masyarakat di sana masih bersifat tradisional dan kurang

mengerti tentang pertanian modern, maka pemerintah memberikan pelatihanpelatihan untuk meningkatkan wawasan para petani, selain itu pemerintah juga memberikan bantuan dana dan juga alat produksi untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal ini.

b) Peran serta masyarakat terhadap pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran

Peran serta masyarakat merupakan hal yang penting dalam mengembangkan ekonomi lokal, karena tanpa adanya peran dari masyarakat pengembangan ekonomi lokal ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu perlu adanya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Seperti yang diungkapkan Aziz (2005) Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, khususnya mereka yang kurang memiliki akses ke sumber daya pembangunan, didorong untuk meningkatkan kemandiriannya di dalam mengembangkan perikehidupan mereka. Pemberdayaan masyarakat juga merupakan proses siklus terus-menerus, proses partisipatif di mana anggota masyarakat bekerja sama dalam kelompok formal maupun informal untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman serta berusaha mencapai tujuan bersama. Jadi, pemberdayaan masyarakat lebih merupakan suatu proses.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kecamatan Pagelaran

a) Faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran Adabeberapa hal

Faktor pendukung dalam pengembangan ekonomi lokal ini di antaranya yaitu tersedianya sumber daya alam yang melimpah. Di Kecamatan Pagelaran sendiri memiliki sumber daya alam yang melimpah khususnya dalam sumber daya pertanian. Banyak berbagai jenis tanaman dapat tumbuh subur di sana seperti padi, tebu, jagung, sayur-sayuran dan buah-buahan. Selain sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia juga menjadi faktor pendorong dalam pengembangan ekonomi lokal. Banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Pagelaran membuat peluang pengembangan ekonomi lokal ini semakin besar karena banyak yang akan mengembangkan ekonomi lokal ini pada daerahnya masingmasing.

b) Faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran

Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran diantaranya rendahnya pengetahuan petani mengenai teknologi pertanian. Dalam era globalisasi ini teknologi telah berkembang dengan cepat. Di mana teknologi saat ini mempunyai fungsi untuk memudahkan

pekerjaan Manusia. Oleh karena itu, dalam konteks proses produksi, maka perlu adanya penguasaan teknologi yang baik sehingga dapat mendorong terjadinya inovasi teknologi. Inovasi teknologi tersebut pada akhirnya dapat menyebabkan penemuan produk-produk baru dan cara produksi yang lebih efisien (Barro dalam Romer, 1994, h.36). Selain itu, pemasaran merupakan hal yang menjadi faktor penghambat berikutnya di mana para kelompok tani merasa kesulitan dalam memasarkan hasil produk yang mereka kembangkan, sehingga perlu peran dari pemerintah untuk membantu memasarkan hasil produk-produk tersebut agar produk tersebut dapat berkembang dengan baik.

KESIMPULAN

Adanya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah membuka peluang pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan intervensi langsung dalam pengembangan ekonomi daerahnya. Selain itu, pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam membuat kebijakan pengembangan ekonomi daerah yang didasarkan pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai kompetitif dan berorientasi global di masing-masing wilayahnya. Konsep pengembangan ekonomi lokal merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada kapasitas lokal yang semakin berkembang. Prinsip utama dalam pengembangan ekonomi lokal adalah kemitraan. Adanya kerjasama pemerintah daerah, swasta dan masyarakat sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program pengembangan ekonomi lokal dalam suatu wilayah. Melihat sektor pertanian merupakan salah satu sektor basis di Kecamatan Pagelaran, maka pengembangan ekonomi lokal dilaksanakan dengan melihat potensi-potensi yang ada di suatu wilayah untuk selanjutnya dikembangkan menjadi suatu produk unggulan. Dalam meningkatkan konsep pengembangan ekonomi lokal ini tidak lepas dari peran pemerintah, di mana pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan, bantuan modal dan juga alat produksi untuk menunjang keberhasilan pengembangan ekonomi lokal. Selain itu peran dari masyarakat itu sendiri juga merupakan faktor penting dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran.

Dalam pengembangan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran ini terdapat beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat. Tersedianya sumber daya alam yang melimpah dan juga banyaknya jumlah penduduk di Kecamatan Pagelaran merupakan salah satu faktor pendukung dalam mengembangkan ekonomi lokal ini. Sedangkan rendahnya pengetahuan petani terhadap paradigma pertanian modern merupakan faktor penghambat dalam mengembangkan ekonomi lokal di Kecamatan Pagelaran. Selain itu juga rendahnya tingkat pemasaran produk merupakan faktor penghambat lainnya. Dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tentu memberikan dampak yang positif khususnya bagi masyarakat di sekitarnya. Adanya pengembangan ekonomi lokal dapat membuka lapangan kerja baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran di Kecamatan Pagelaran, selain itu dengan adanya pengembangan ekonomi lokal ini tentu dapat meningkatkan perekonomian bagi masyarakat di Kecamatan Pagelaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Alim, S. (2021). DIMENSI RELIGIUSITAS DALAM BISNIS (Studi Pada Pedagang Kuliner di Pasar Beringharjo Yogyakarta). *EL-HIKAM: Jurnal Pendidikan Dan Kajian Keislaman*, XIV, 1–16.
- Badjuri, A. (2011). Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga anti korupsi di Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 18(1), 84–96.
- Fareza, M. (2016). Dampak Kebijakan Perekonomian Era Orde Baru Terhadap Pembangunan di Indonesia. *Repository.Upy.Ac.Id*, 1–10.
<http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1203>
- Global Green Growth Institute. (2015). Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau untuk Indonesia yang Sejahtera. *Global Green Growth Institute*, 1–21.
www.ggp.bappenas.go.id
- Hauzan, A., Yulmardi, Y., & Hardiani, H. (2021). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan pengeluaran pemerintah, pengangguran dan pendapatan asli daerah terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jambi. *E-Jurnal Perspektif Ekonomi Dan Pembangunan Daerah*, 10(3), 211–222.
<https://doi.org/10.22437/pdpd.v10i3.16496>
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p11>
- Nurjihadi, M., & Dharmawan, A. H. (2016). Lingkaran Setan Kemiskinan Dalam Masyarakat Pedesaan, Pulau Lombok. *Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 120–127.
- Rahmayani, D., Yuliani, R., Kristanti, N. R., Marpaung, G. N., Supriyadi, A., & Nurfauzi, M. (2022). Peningkatan Kapabilitas Green Economy Dalam Pengembangan Desa Wisata Sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 171.
<https://doi.org/10.24198/kumawula.v5i1.36289>
- Syihab, M. B., Utomo, Y. T., & Yusanto, I. (2022). Mengatasi Ancaman Pasar Bebas Pada Ketahanan Pangan Nasional Dengan Ekonomi Islam. *Youth Islamic Economic Journal*, 03(01), 36–45.
- Yulia, D. (2019). Revolusi Hijau Kebijakan Ekonomi Pemerintah Bidang Pertanian Di Kanagarian Selayo Tahun 1974-1998. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.33373/hstr.v4i2.1931>
- Zainul, M. (2019). Korupsi Perizinan Dalam Perjalanan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 887–896.
- Banking, I., December, F., Author, T., Reserved, A. R., & Doi, P. D. (2014). Socio-Ethical Dimensions of Islamic Economy and Issue of Modern Interest and RIBA: An Analysis in the Light of the Economy of the Muslim World Naseem Razi 12. 2(2), 27–42.
<https://doi.org/10.15640/jibf.v2n2a3Ghozali>
- M & Khoirunnisa, R. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Pemikiran

- Abu Ubaid. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Islamic Economics and Business)*, 4(1), 64. <https://doi.org/10.20473/jebis.v4i1.10068Hasibuan>.
- M. S. W., Shiddieqy, H. A., Kamal, A. H., Sujono, R. I., Triyawan, A, Nasrudin, M. Z., Fajri, Wadud, A. M. A., Utomo, Y. T., Surepno, Muttaqin, Z., Misno, A., Asrofi, I., 146
- Rakhmawati, Adnir, F., & Mubarrok, U. S. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. In A. Triyawan (Ed.), *Media Sain Indonesia*(1st ed.). Media Sain Indonesia. [https://play.google.com/store/books/details/Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=USKailani](https://play.google.com/store/books/details/Sejarah+Pemikiran+Ekonomi+Islam?id=g2lUEAAAQBAJ&hl=en_US&gl=USKailani).
- M & Slama, M. (2020). Accelerating Islamic charities in Indonesia: zakat, sedekah and the immediacy of social media. *South East Asia Research*, 28(1), 70–86. <https://doi.org/10.1080/0967828X.2019.1691939Khoirunnisa>.
- R., & Ghozali, M. (2018). Konsep Pengelolaan Keuangan Islam Menurut Abu Ubaid. *Ekonomi Islam*, 9(2), 197–210. Masykuroh, N. (2020). *Sistem Ekonomi Dunia*(2020th ed.). Media Karya. <https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/macam-macam-sistem-ekonomi-di-dunia-apa-saja-1913/#:~:text=Setidaknya%2C>
- Rabbani, M. R., Ali, M. A. M., Rahiman, H. U., Atif, M., Zulfikar, Z., & Naseem, Y. (2021). The response of islamic financial service to the covid-19 pandemic: The open social innovation of the financial system. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 7(1). <https://doi.org/10.3390/JOITMC7010085Sa'adah>.
- M., & Hasanah, U. (2021). The Common Goals of BAZNAS'Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial*, 16(2), 302–326. <https://doi.org/10.19105/AL-LHKAM.V16I2.4990Suretno>.